

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

IAI dalam PSAK No.1 (Revisi 2009) paragraf 0 secara implisit menyarankan untk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan yaitu “perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup laporan nilai tambah khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

Pernyataan ini secara jelas menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang industri yang menghasilkan limbah haus bertanggung jawab dn memiliki kepedulian terhadap lingkungan disekitarnya. Dengan dikeluarkanya ketentuan ini diharapkan kesadaran perusahaan terhadap lingkungan bertambah. Ketentuan mengenai praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga diatur dalam undang-undang R.I. No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang “Tanggung jawab sosial dan lingkungan” menyatakan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan berkaitn dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Peraturan lain yang mengatur mengenai kewajiban pengungkapan CSR juga diatur dala undang-undang penanaman modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian (b) pasal 17,

dan pasal 34 yang mengatur bahwa setiap modal diwajibkan untuk ikut dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan, Menurut (Amal, 2001) regulasi ini menjelaskan kewajiban bagi ssetiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan pemerintan berikutnya juga masih mengatur menegenai kewajiban CSR di indonesia adalah UU yang mengatur perusahaan yang termasuk dalam *regaluted company* yaitu 1) UU minyak dan Gas bumi No.22 tahun 2001; 2) UU pertambangan umum No. 11 tahun 1967; 3) UU No. 23 tahun 1997; 4) UU Telekomunikasi No. 36 tahun 199;5) UU tentang pengelolaan hutan dan ketentuan dari surat keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 236/MBU2003 yang mengatur pengungkapan CSR bagi perusahaan BUMN.

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan suatu gagasan tentang pentingnya tanggung jawab dan kepedulian perusahaan yang diwujudkan melalui program-program yang memiliki nilai-nilai sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat. Hal itu dapat dilakukan oleh perusahaan dengan berinvestasi pada sektor-sektor ramah lingkungan, menjaga keseimbangan eksploitasi sumber daya alam, pengelolaan limbah (daur ulang limbah), menaikkan pengeluaran-pengeluaran sosial (biaya sosial) serta cara lain guna menjaga keseimbangan lingkungan dan sejenisnya (amal,2001).

¹Amal, Mahmud. 2001 **Pengaruh Manajemen laba, Kepemilikan Manajerial, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap Pengungkapan Taggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR.** Fakultas Ekonomi dan bisnis. Undib. Semarang.

Pengungkapan tanggung jawab sosial atau yang sering disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dan masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Grey et, al., 1987 dalam Rosmasita, 2007). Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu elemen pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Salah satu media yang dapat digunakan untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan adalah melalui laporan tahunan (*annual report*) perusahaan. Dengan mengungkapkan CSR perusahaan nantinya dapat memperoleh legitimasi sosial sehingga perusahaan dapat memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang melalui respon positif masyarakat dan para pelaku pasar saham (Kiroyan, 2006) dalam Sayekti dan Wondabio (2007).

Beberapa permasalahan dan kasus terkait CSR yang melibatkan perusahaan manufaktur di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur memiliki andil yang cukup besar dalam permasalahan lingkungan dan sosial yang terjadi. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh sifat perusahaan manufaktur yang merupakan perusahaan yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat. Kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan manufaktur akan menghasilkan limbah yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.

²Kiroyan, Noke. 2006. *Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Adakah kaitan di Antara keduanya ?*. *Economics Business Accounting Review*, Edisi III, September-Desember 2006: 45-58.

Selain itu dalam proses produksi mengharuskan perusahaan mempunyai tenaga kerja dibagian produksi yang erat kaitannya dengan masalah keselamatan dan kesejahteraan kerja (Permana, 2012).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan penurunan ketaatan sektor manufaktur dalam pengelolaan lingkungan dalam aktivitas industrinya dipengaruhi oleh aspek terkait pengendalian pencemaran air. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan M.R. Karliansyah mengatakan penyebab dominan ketidaktaatan industri manufaktur berkaitan aspek mencemaran air atau sebesar 34%, diikuti oleh aspek pengelolaan limbah (30%), dan aspek pengendalian pencemaran udara (18%). Menurutnya, tahun lalu ketaatan sektor manufaktur termasuk prasarana dan jasa sebesar 64%, tetapi tahun ini malah mengalami kemerosotan. Aspek pengendalian pencemaraan air sendiri, tidak memiliki izin pembuangan kualitas air limbah, tidak melaporkan pemantauan kualitas air limbah, tidak memantau parameter lengkap, pemantauan kualitas air limbah melebihi baku mutu air limbah, serta ketentuan teknis tidak sesuai aturan. (www.bisnis.com 11/12/2015)

Sebuah perusahaan dianggap sebagai suatu lembaga yang memberikan berbagai kontribusi bagi masyarakat. Perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan untuk dikonsumsi, memberikan sumbangan dan membayar pajak kepada pemerintah.

³<http://www.bisnis.com/2015/11>. Fenomena yang terjadi tentang CSR

Perusahaan sering hanya memaksimalkan laba itu sendiri, akhirnya disadari bahwa dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat semakin besar dan sulit untuk dikendalikan seperti polusi, keracunan, kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, dan kesewenangwenangan. Oleh karena itu, masyarakat menuntut agar perusahaan senantiasa memperhatikan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dan upaya untuk mengatasinya. (Kusuma, 2012).

Penelitian yang telah ada sebelumnya dilakukan untuk menguji kembali hubungan struktur kepemilikan dengan pengungkapan CSR. Adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan isu yang menjadi topik yang penting untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan kepemilikan eksternal, Semakin besar kepemilikan eksternal maka semakin besar pula tekanan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR). Pengungkapan CSR merupakan salah satu media yang digunakan untuk menunjukkan kepedulian perusahaan masyarakat pada masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI (periode 2016-2017).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian terdahulu dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan; studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2014”

adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi variabel penelitian terdahulu menggunakan variabel kepemilikan manajemen, komisaris independen, profitabilitas, tipe industri dan Global report Initiative (GRI) G4

Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan struktur kepemilikan eksternal sebagai variabel independen. Dan periode pengamatan pada riview terdahulu menggunakan periode pengamatan pada tahun 2014,

sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode pengamatan pada tahun 2016-2017.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2016-2017 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuarikan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem kepemilikan terhadap tanggung jawab lingkungan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada peride 2016-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut :

a. Bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan dan referensi dalam meningkatkan kinerja perusahaan sehubungan dengan tingkat tanggung jawab lingkungan.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana sebagai bahan masukan dan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN

HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori stakeholder

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja (stakeholders) perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 2001). Tujuan dari manajemen stakeholders adalah merancang metode untuk mengelola berbagai kelompok dan hubungan yang dihasilkan dengan cara yang strateis (Freeman dan McVe, 20011). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholdernya*. Terutamastakeholder yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumberdaya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Ghozali dan Chariri,2007).

Salah satu strateri untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder perusahaan adalah dengan melaksanakan CSR, dengan pelaksanaan CSR diharapkan keinginan dari stakeholder dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaaan dengan stakeholder nya. Hubungan yang harmonis akan berakibat pada perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya (*Sustainability*).

⁴Freeman, R.E dan J. McVea 2001, *A Stakeholder Approach to Strategic Management*, SSRN.

Stakeholder theory menurut Ghozali & Chariri, 2007) mengatakan bahwa, perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus bermanfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan stakeholder kepada perusahaan tersebut.

2.1.2. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori Legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) bisa diterima oleh pihak luar perusahaan. Deegan (2002) mendefinisikan teori legitimasi sebagai:

“...sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas dimana masyarakat menjadi bagiannya. Ketika suatu perbedaan, baik yang nyata atau potensial ada diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.”

O'Donovan (2000) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat diterima sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang ingin dicari atau diharapkan perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup perusahaan (*going concern*)

⁶Deegen, C 2004. *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill Book Company: Sydney.

⁷Ghozali, Imam chariri, 2007. *Teori Akuntansi Edisi 4*. Badan penerbit Undip: Semarang

Legitimasi merupakan hal yang sangat diinginkan oleh perusahaan. Legitimasi penting untuk menjamin arus modal masuk, tenaga kerja, dan kebutuhan pelanggan untuk kelangsungan hidup perusahaan (Pleffer dan Salanick, 1978; Neu et al., 1998; dikutip dari Michelon dan Parbonetti, 2010).

Seringkali keberadaan atau eksistensi perusahaan bersinggungan langsung dengan masyarakat, jika perusahaan ingin diterima oleh masyarakat maka perusahaan harus menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kegiatan operasional perusahaan seringkali mempengaruhi masyarakat sekitarnya.

Top management sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan berusaha untuk memperoleh kesesuaian antara tindakan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat umum dan publik atau *stakeholder*-nya (Dowling dan Pleffer, 1975 dalam Hanifa dan Cooke, 2005; Ani, 2007) dalam Machmud dan Djakman, 2008).

Keberadaan atau eksistensi perusahaan akan terwujud ketika keselarasan antara tindakan organisasi dan nilai-nilai dalam masyarakat berjalan sesuai dengan harapan. Namun jika tidak terjadi keselarasan maka akan menimbulkan perbedaan antara tindakan organisasi dengan nilai masyarakat yang dapat mengancam legitimasi perusahaan. Sethi dalam Haniffa dan Cooke (2005); Ani (2007) dalam Machmud dan Djakman (2008) menjelaskan bahwa perbedaan antara organisasi dan nilai-nilai sosial dapat mengancam legitimasi yang menyebabkan berakhirnya eksistensi perusahaan.

¹⁰Mahmud. 2001 **Pengaruh Manajemen laba, Kepemilikan Manajerial, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap Pengungkapan Taggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR.** Fakultas Ekonomi dan bisnis. Undib. Semarang.

2.1.3. Pengertian dan Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan memiliki arti bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya. Kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan manusia, komunitas maupun lingkungan pasti memiliki dampak terhadap kehidupan di sekitar perusahaan. Dampak tersebut kemungkinan dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif yang timbul seringkali terjadi karena perusahaan tidak memperhatikan kondisi lingkungan tempat perusahaan berada. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham (pemilik), tetapi juga kepada semua pihak (konsumen, pegawai, kreditur, dsb) yang memiliki kontribusi penting bagi keberhasilan perusahaan (Frederick et al. 1992).

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai suatu konsep meski telah ramai diperbincangkan, sampai saat ini masih belum memiliki batasan yang sepadan. Banyak ahli dan para praktisi masih belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi, meskipun dalam banyak hal memiliki kesamaan esensi. Johnson (2006) mendefinisikan :

...Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society.

¹¹Frederick, **Bussines and Society : Corporate Strategy, Public policy**. M.C Graw Hill Book, New York 1992.

Definisi tersebut pada dasarnya menerangkan bahwa CSR berangkat dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Lain halnya dengan *World Bank* (Bank Dunia) yang mendefinisikan CSR sebagai:

CSR is commitment of bussiness to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of live, in ways that are both good for business and good for sustainaibility development.

Maksud dari definisi di atas adalah CSR merupakan suatu komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat bekerja sama dengan karyawan dan perwakilan mereka, masyarakat sekitar dan masyarakat yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara yang baik bagi bisnis maupun baik bagi pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yang merupakan lembaga internasional dan telah berdiri sejak tahun 1955 dengan beranggotakan 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara lewat publikasinya yang berjudul „*Making Good Business Sense*”, mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai berikut :

...Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”

Definisi tersebut menunjukkan tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk peningkatan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi golongan keluarga, sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

2.1.4. Pengungkapan *CSR (Corporate Social Responsibility)* di Indonesia

Pengungkapan atau *Disclosure* dapat diartikan sebagai pemberian informasi bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut (Ghazali dan Chariri, 2007). Terdapat tiga kriteria pengungkapan yang digunakan yaitu cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*). Pengungkapan pertama yaitu pengungkapan cukup artinya cakupan pengungkapan minimal yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan. Pengungkapan wajar adalah tujuan etis dalam memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum terhadap semua pemakai informasi yang relevan. Pengungkapan lengkap adalah penyajian semua informasi yang relevan.

Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya.

¹²Ghozali, Imam chariri, 2007. **Teori Akuntansi Edisi 4**. Badan penerbit Undip: Semarang

Masyarakat sebagai pihak luar perusahaan membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Oleh karena itu dalam perkembangan sekarang ini akuntansi konvensional telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini yang kemudian menyebabkan munculnya konsep akuntansi baru yang disebut sebagai *Social Responsibility Accounting* (SRA) atau Akuntansi Pertanggung jawaban Sosial.

Kewajiban pengungkapan CSR telah diatur dalam beberapa ketentuan. Ketentuan pertama adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Bapepam No. Kep. 38/PM/1996. Ketentuan ini menyatakan ada 2 jenis pengungkapan yang digunakan di Indonesia. Pertama adalah pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Sedangkan yang kedua adalah pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan sukarela berarti pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Ketentuan atau regulasi ini tidak mengharuskan perusahaan melakukan pengungkapan. Oleh karena itu perusahaan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan informasi sosialnya.

Chariri dan Ghozali (2007) mengungkapkan bahwa informasi diungkapkan dapat mengakibatkan kegagalan pasar,

¹³Ghozali, Imam chariri, 2007. **Teori Akuntansi Edisi 4**. Badan penerbit Undip: Semarang

hal tersebut disebabkan karena adanya pembenaran akan intervensi pemerintah untuk memaksa perusahaan untuk melakukan pengungkapan. Pengungkapan itulah yang disebut pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Di Indonesia yang menjadi otoritas pengungkapan wajib adalah Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal).

Sedangkan ketentuan yang kedua yaitu ketentuan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 2009) paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggungjawab sosial, yaitu sebagai berikut :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

Pernyataan diatas mengisyaratkan bahwa aturan atau regulasi pemerintah mengenai pengungkapan telah disebutkan dengan jelas melalui keputusan Bapepam dan pernyataan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 1 (revisi 2009). Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk lebih mau mengungkapkan kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosialnya di dalam laporan tahunan (*annual report*)

Pernyataan mengenai kewajiban pengungkapan ini juga semakin dipertegas dengan ketentuan pemerintah dalam undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 Pasal 66 dan Pasal 74. Pasal 66 ayat (2) bagian C

menyebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perseroan terbatas juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Pengungkapan di Indonesia sendiri telah mengacu pada berbagai standar pengungkapan yang digunakan negara-negara lain di seluruh dunia. Salah satunya standar pengungkapan dari *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI merupakan jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, menggunakan kerangka laporan berkelanjutan paling banyak dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. Standar GRI digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) dan UNEP pada tahun 1997.

Standar yang mengacu pada GRI (*Global Reporting Index*) membagi indikator kinerja menjadi 3 komponen utama yaitu, ekonomi, lingkungan hidup dan sosial yang menyangkut hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk dan masyarakat. Di dalam indeks GRI dijelaskan indikator-indikator tentang beberapa kategori *CSR* yang mencakup 79 indikator yang terdiri dari 9 indikator ekonomi, 30 indikator lingkungan hidup, 14 indikator praktik tenaga kerja, 9 indikator hak asasi manusia, 8 indikator kemasyarakatan, dan 9 indikator terkait tanggung jawab produk.

Pada setiap kategori pengungkapan GRI tersebut terdiri dari beberapa item sehingga sehingga apabila dijumlahkan totalnya menjadi 78 item. Masing-masing

item pada tiap kategori pengungkapan diberi skor 1 sehingga jika perusahaan mengungkapkan 1 item saja maka skor yang diperoleh adalah 1. Jadi jumlah skor maksimal jika perusahaan mengungkapkan semua item kategori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah 79. Item-item yang disebutkan GRI *guidelines*, minimal harus mencakup antara lain :

- a. Indikator kinerja ekonomi (*economics*)
- b. Indikator kinerja lingkungan hidup (*environment*)
- c. Indikator kinerja praktik ketengakerjaan dan lingkungan (*labour practices*)
- d. Indikator kinerja hak asasi manusia (*human rights*)
- e. Indikator kinerja praktik ketenagakerjaan dan lingkungan (*society*)
- f. Indikator kinerja tanggung jawab produk (*product responsibility*)

2.1.5. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan saham yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya suatu perusahaan diwakili oleh direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh pemegang saham (*principals*). Franita R (2018)

¹⁴Principe, A 2004. **Proprietary Cost and Deteminant of Volume Segment Disclosure: Evidence from Italian Listed Companies.** *European Accounting Riview* 13 (2) : 319-340.

Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan publik institusioanal adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi badan hukum, institusi luar negeri, perwalian, dan institusi lainnya. Masruroh and Bastian (2018).

Kepemilikan eksternal dalam hal ini adalah kepemilikan masyarakat atau publik. Kepemilikan publik adalah kepemilikan yang dimiliki oleh publik atau masyarakat. Dalam meningkatkan nilai perusahaannya diperlukan pendanaan baik melalui internal maupun eksternal. Sumber pendanaan eksternal juga didapat dari masyarakat (publik). Kepemilikan publik merupakan persentase saham yang dimiliki oleh publik. Persentase kepemilikan publik yang ada di sebuah perusahaan dapat memonitoring perusahaan dengan adanya kepemilikan publik yang besar. Maka semakin banyak pula pengawasan yang dilakukan dan perusahaan juga harus dapat mengungkapkan seluruh informasi yang diperlukan oleh pemegang saham. Franita R (2018).

¹⁵R. Franinta, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai perusahaan, I ed., Medan, Lembaga Penelitian dan penulisan Ilmiah AQLI, 2018.*

Dengan adanya kepemilikan publik yang besar diharapkan perusahaan lebih transparan dalam pengungkapan informasi mengenai perusahaan yang akan berdampak terhadap nilai perusahaan dan dengan adanya pengawasan oleh pihak kepemilikan publik terhadap manajemen dapat membuat pihak manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan.

Struktur kepemilikan dipercaya dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham yang dimana akan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap perusahaan.

Struktur Kepemilikan diukur dengan melihat berapa besar saham yang dimiliki oleh pihak eksternal (publik) terhadap total saham yang beredar. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Publik} = \frac{\text{Jumlah Saham Kepemilikan Publik}}{\text{Publk Total saham yang beredar}}$$

2.2. Riview Penelitian Terdahulu

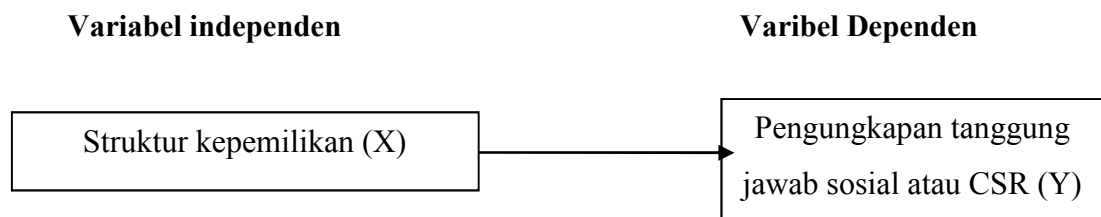
Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas mengenai fakto-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab lingkungan atau CSR karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Adapun review dari beberapa penelitian terdahulu, Antara lain :

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel | Hasil Penelitian |
|----|--|--|---|---|
| 1 | Carmelo Reverte (2009) | Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings by Spanish Listed Firms | Dependen: Pengungkapan CSR Independen: Media Exposure, International Listing, Profitabilitas (ROA), Size, Struktur Kepemilikan, Sensivitas Industri, dan Leverage | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel media exposure, international listing, size, struktur kepemilikan, dan sensitivitas industri terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan variabel profitabilitas dan leverage tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. |
| 2 | Anggara Fahrizqi (2010) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Dalam Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia | Dependen: Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas (ROA), <i>Leverage</i> , dan Ukuran Dewan Komisaris | Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dengan arah positif, sedangkan <i>leverage</i> dan ukuran dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. |
| 3 | Nike Nur Aini dan Nur Cahyonowati (2011) | Pengaruh Karakteristik <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | Dependen: Luas Pengungkapan CSR Independen: Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Kepemilikan | Hasil penelitian ini menemukan hanya tiga variabel yaitu ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan untuk Independensi Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. |

| | | | Terkonsentrasi | |
|---|--|--|---|--|
| 4 | Linda Santioso dan Erline Chandra (2012) | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Umur Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen dalam Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> : Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI | Dependen: Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Independen: Profitabilitas (ROE), Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Umur Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen | Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . Sedangkan untuk <i>leverage</i> dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . |
| 5 | Nike Meilissa Zulfi (2014) | Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> Pada Perusahaan <i>Go Public</i> Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012 | Dependen: Pengungkapan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> Independen: Kepemilikan Saham Pemerintah, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas | Tipe Industri dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial sosial. Sedangkan Kepemilikan Saham Pemerintah dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. |

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konsep bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi oleh peneliti sebagai masalah penting. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah Pengungkapan Tanggung jawab sosial dan variabel independen adalah Struktur Kepemilikan. Kerangka konseptual penelitian ini disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR).

Adanya kepemilikan publik yang besar serta banyaknya pengawasan yang dilakukan dan perusahaan diharapkan mengungkapkan seluruh informasi yang diperlukan oleh pemegang saham. Semakin banyak persentase kepemilikan eksternal/ publik akan berupaya menyampaikan pengungkapan tanggung jawab sosial secara tepat waktu hal ini berkaitan untuk menambah nilai perusahaan dan kepercayaan dari investor.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa struktur kepemilikan eksternal berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial oleh Marzully Nur dan Denies Priantinah (2012). Dan didukung oleh penelitian yang lain yang mengatakan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial oleh Carmelo Reverte (2009).

H₁ : Struktur kepemilikan eksternal berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR).

¹⁷Carmelo Reverte.2009 **Determinants Of Corporate Social Responsibility** vol.88, pp 351-366.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.

3.2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan mengunduh data laporan keuangan pada situs www.idx.co.id. Periode pengamatan dalam penelitian yaitu selama 2 tahun periode 2016-2017. Peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena masih terjadinya masalah dalam pelaporan keuangan secara tepat waktu.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode dua tahap yaitu :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari jurnal akuntansi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tersedia di website BEI.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2017, jumlah populasi sebanyak 160 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini ada sebanyak 62 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu teknik penyelesaian masalah penelitian berdasarkan kriteria-kriteria dan tujuan tertentu. Kriteria perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di BEI periode 2016-2017
2. Perusahaan manufaktur yang memperoleh laba selama periode pengamatan periode 2016-2017
3. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah (Rp).

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel

| Keterangan | Jumlah |
|--|--------|
| Populasi Penelitian : Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2016-2017 | 160 |
| Kriteria : | |

| | |
|--|------|
| 1. Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar berturut-turut di BEI periode 2016-2017 | (26) |
| 2. Perusahaan manufaktur yang tidak memperoleh laba selama periode pengamatan tahun 2016-2017 | (44) |
| 3. Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah (Rp) | (28) |
| Jumlah Sampel | 62 |
| Jumlah Data Pengamatan (62 x 2) | 124 |

Tabel 3.2 Daftar Sampel penelitian

| No | Kode Emiten | Nama Emiten |
|----|-------------|---|
| 1 | ADES | Akasha Wira Internasional Tbk |
| 2 | AKPI | Argha Karya Prima Industri Tbk |
| 3 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk |
| 4 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk |
| 5 | APLI | Asiaplast Industries Tbk |
| 6 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk |
| 7 | ASII | Astra Internasional Tbk |
| 8 | AUTO | Astra Otoparts Tbk |
| 9 | BATA | Sepatu Bata Tbk |
| 10 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk |
| 11 | BUDI | PT Budi Starch and Sweetener Tbk |
| 12 | CEKA | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk |
| 13 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| 14 | DLTA | Delita Djakarta Tbk |
| 15 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara |
| 16 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk |
| 17 | EKAD | Ekadharma International Tbk |
| 18 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
| 29 | HMSP | Hm Sampoerna Tbk |
| 20 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| 21 | IGAR | Champion Pasific Indonesia Tbk |
| 22 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk |
| 23 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk |
| 24 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
| 25 | INDS | Indospring Tbk |
| 26 | INTP | Indocement Tunggul Prakarsa Tbk |
| 27 | ISSP | PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk |
| 28 | JECC | Jembo Cable Company Tbk |
| 29 | JPFA | JAPFA Comfeed Indonesia Tbk |
| 30 | KAEF | Kimia Farma (Persero) Tbk |
| 31 | KBLI | KMI Wire and Cable Tbk |
| 32 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk |
| 33 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk |
| 34 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
| 35 | LION | Lion Metal Works Tbk |
| 36 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk |
| 37 | MERK | Merek Tbk |

| | | |
|----|------|---|
| 38 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk |
| 39 | MYOR | Mayora Indah Tbk |
| 40 | NIPS | Nipress Tbk |
| 41 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk |
| 42 | PYFA | Pyridam Farma Tbk |
| 43 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk |
| 44 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk |
| 45 | SCCO | Supreme Cable manufacturing Corporation Tbk |
| 46 | SIDO | PT Industri Jamau dan Farmasi Sido Muncul Tbk |
| 47 | SKBM | Sekar Bumi Tbk |
| 48 | SMBR | PT Semen Batubara (Persero) Tbk |
| 49 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk |
| 50 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk |
| 51 | SRSN | Indo Acidatama Tbk |
| 52 | STAR | Star Petrochem Tbk |
| 53 | STTP | Siantar Top Tbk |
| 54 | TCID | Mandom Indonesia Tbk |
| 55 | TOTO | Surya Tato Indonesia Tbk |
| 56 | TRIS | Trisula International Tbk |
| 57 | TRST | Trias Sentosa Tbk |
| 58 | TSPC | Tempo Scan Pacifik Tbk |
| 59 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry Tbk |
| 60 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk |
| 61 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk |
| 62 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk |

3.5. Defenisi operasional Variabel

Adapun variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

3.5.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap pemegang saham, kreditor, karyawan, dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Pengungkapan informasi sosial dikelompokkan menjadi 6 kelompok sesuai dengan kategori informasi sosial menurut *Global Reporting Intiatives (GRI)* (2000-2006) yang telah disesuaikan dengan pelaksanaan *CSR* di Indonesia. Kategori dalam *GRI* ini meliputi kategori

economic, environment, labour practices, human rights, society, dan product responsibility. Pada setiap kategori tersebut terdiri dari beberapa item sehingga totalnya menjadi 79 item. Masing-masing item pada tiap-tiap indikator pengungkapan diberi skor 1 sehingga jika perusahaan mengungkapkan satu item saja maka skor yang diperoleh adalah 1.

Jadi apabila perusahaan mengungkapkan semua item kategori pengungkapan tanggung jawab sosial skor maksimal yang akan diperoleh adalah 79. Adapun rumus untuk menghitung indeks pengungkapan CSR menurut kategori GRI sebagai berikut :

$$CSRI = \frac{\sum xY_i}{n_i} \text{Keterangan :}$$

CSRI = Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i.

$\sum xY_i$ = nilai 1= jika y diungkapkan; 0=jika item y tidak diungkapkan

n_i = Jumlah item untuk i, $n_i \leq 78$.

Pengukuran indeks pengungkapan CSR dilakukan dengan menggunakan metode content analisis (*content analysis*) yaitu suatu pengkodifikasian teks dengan ciri-ciri yang sama ditulis dalam kelompok atau kategori berdasarkan kinerja yang ditentukan (Weber 1988, Sembiring 2005 dalam Rakhmawati 2011). Pengukuran luas kebijakan pengungkapan CSR ini dilakukan dengan cara *non repeated* yaitu hanya menghitung satu kali untuk setiap untuk item-item yang diungkapkan, tanpa mempertimbangkan apakah item tersebut disebutkan kembali di halaman lain atau bagian lain dengan bahasa yang berbeda.

Selain menggunakan laporan tahunan (*annual report*). Pengukuran pengungkapan CSR juga dilakukan dengan melihat item-item pengungkapan yang termuat di dalam laporan

tambahan atau laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) dalam mengukur luas pengungkapan CSR berdasarkan item pengungkapan yang termuat dalam GRI (*Global Reporting Index*) *Guidelines versi 3.0*

3.5.2. Variabel Independen

Kepemilikan publik adalah kepemilikan yang dimiliki oleh publik atau masyarakat. Struktur Kepemilikan diukur dengan melihat berapa besar saham yang dimiliki oleh pihak eksternal terhadap total saham yang ada. Adapun rumus menghitung Struktur Kepemilikan Publik .

$$\text{Kepemilikan Publik} = \frac{\text{jumlah saham kepemilikan publik}}{\text{Total saham yang beredar}} \dots\dots\dots$$

3.6. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti mengolah data dengan menggunakan software statistika IBM SPSS versi 23. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, sum, *range*, kurtosis, dan *skeawnes* (Ghozali,2018).

3.6.1. Uji Asumsi Klasik

Mengingat alat analisa yang digunakan adalah analisa regresi berganda dan data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk memenuhi syarat yang ditentukan sehingga penggunaan model regresi linear berganda perlu dilakukan pengujian atas beberapa

asumsi klasik yang digunakan yaitu : uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.6.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Analisis data mensyaratkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data. Data yang tidak normal tidak dapat digunakan karena dapat menimbulkan bias dalam interpretasi dan mempengaruhi data lainnya. Pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui analisis grafik dan analisis statistik. Imam Ghozali (2018).

¹⁸Ghozali, imam. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Univesitas Diponegoro.

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Analisis data mensyaratkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data. Data yang tidak normal tidak dapat digunakan karena dapat menimbulkan bias dalam interpretasi dan mempengaruhi data lainnya. Pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui analisis grafik dan analisis statistik.

a. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih baik adalah dengan melihat *normal probabilityplot* yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pada prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

¹⁹Ghozali, imam. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui analisis statistik yang salah satunya dapat dilihat melalui *Kolmogorov Smirnov Test* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 = Data residual terdistribusi normal

H_1 = Data residual tidak terdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test* adalah sebagai berikut:

1. Jika signifikansi $\alpha > 0,05$, maka keputusannya adalah menerima H_0 , yang berarti data berdistribusi normal

2. Jika signifikansi $\alpha < 0,05$, maka keputusannya adalah tolak H_0 , yang berarti data berdistribusi tidak normal

3.6.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas yang tinggi antar variabel independen dapat dideteksi dengan cara melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas adalah nilai tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10

3.6.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang *Homoskedastisitas* atau tidak terjadi *Heteroskedastisitas*. Analisis uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dan analisis statistik.

a. Analisis Grafik

Analisis grafik plot antara nilai variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residualnya (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*. Dasar analisis:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergabung, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi *Heteroskedastisitas*.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Analisis Statistik

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya *heterokedastisitas* adalah uji *Glejser*. Uji *Glejser* bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian statistik adalah:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi *heterokedastisitas*
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka terjadi *heterokedastisitas*

3.6.4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota – anggota serangkaian observasi yang tersusun dalam rangkaian waktu atau yang tersusun dalam rangkaian ruang. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan karena pada

data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada seorang individu atau kelompok yang sama pada priode berikutnya.

Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Run Test*. *Run Test* merupakan bagian dari statistik *non-parametrik* yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

H₀: residual (res_1) random (acak)

H_a: residual (res_1) tidak random

Dasar pengambilan keputusan adalah:

1. Apabila nilai hasil *Run Test* lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, maka tidak terdapat masalah autokorelasi.
2. Apabila nilai hasil *Run Test* lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, maka terdapat masalah autokorelasi.

3.7. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, peneliti menggunakan uji signifikansi F (uji statistik-F) dan uji signifikansi parsial (uji statistik-t).

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik-F)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama – sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0: b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$$

Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama–sama struktur kepemilikan terhadap Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan Hipotesis alternatif (H_a) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_a: b_1, b_2, b_3, b_4, \neq 0$$

Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama–sama dari Kinerja Keuangan terhadap Nilai perusahaan. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan dengan tingkat nilai signifikan sebesar 0,05 maka:

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, dan nilai signifikan $> \alpha$, maka H_0 diterima.
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan nilai signifikan $\leq \alpha$, maka H_0 ditolak.

c. Uji koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Selain nilai koefisien determinasi, pada analisis regresi berganda penggunaan koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R Square / Adjusted R^2*) dapat lebih baik dalam melihat seberapa baik model regresi untuk memprediksi variabel dependen dibandingkan dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi yang disesuaikan merupakan penyesuaian dari

koefisien determinasi terhadap tingkat kebebasan dari persamaan regresi guna melindungi kenaikan atau kesalahan akibat kenaikan jumlah variabel independen dan kenaikan dari jumlah sampel penelitian. Cara menentukan nilai dari *Adjusted R2* adalah:

1. Apabila nilai *Adjusted R2* negatif, maka nilai *Adjusted R2* dianggap bernilai nol (0)
2. Jika nilai $R^2 = 1$, maka nilai dari *Adjusted R2* = R^2 yaitu 1.
3. Jika nilai $R^2 = 0$, $Adjusted R2 = (1-k) / (n-k)$, dimana apabila $k > 1$, maka *Adjusted R2* akan bernilai negatif

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Apabila R^2 mendekati 1 berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Apabila R^2 mendekati 0 berarti variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel dependen. Ghazali (2018)